

# Strategi Pengembangan Produk Pertanian Indonesia Menghadapi Hambatan Non-Tarif Perdagangan Internasional

Ninda Novita<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Department of Agribusiness, Faculty of Economic and Management, IPB, Dramaga-Bogor, Indonesia\*

Corresponding Author: [nindanovita2022@gmail.com](mailto:nindanovita2022@gmail.com)

## ABSTRACT

Sektor pertanian merupakan kekuatan utama dalam menentukan pembangunan nasional Indonesia. Bahkan sektor pertanian berkontribusi besar dalam perdagangan internasional, oleh sebab itu dibutuhkan pemberdayaan pada sektor pertanian Indonesia agar produk pertanian yang dihasilkan dapat mengimbangi produk impor dan ekspor. Indonesia mengalami cukup banyak hambatan dalam melakukan kerjasama antar negara, yang paling berdampak terhadap sektor pertanian adalah hambatan non-tarif. Oleh karena itu, fokus penelitian ini diperluas terhadap bagaimana strategi pengembangan produk pertanian dalam menghadapi hambatan non-tarif pada perdagangan internasional. Metode penelitian menggunakan analisis gravity model dan deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan hambatan non-tarif tidak berpengaruh signifikan terhadap total ekspor. Namun hambatan non-tarif berdampak empat kali lipat terhadap sektor pertanian. Sehingga dibutuhkan nilai tambah terhadap produk ekspor dan pemberdayaan petani menjadi level eksportir dengan mengenalkan prinsip ilmiah, penilaian resiko jangka panjang, batas toleransi residu, mendorong sertifikasi internasional berkelanjutan, serta regulasi dalam mendukung administrasi produk ekspor serta akses informasi peluang produk ekspor.

## ARTICLE INFO

Keywords:  
ekspor, hambatan non-tarif, sektor pertanian,

## 1. INTRODUCTION

Pertanian di Indonesia memainkan peran kunci dalam mendorong pembangunan nasional. Tidak hanya berperan pada perdagangan dalam negeri, sektor pertanian juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perdagangan internasional. menghasilkan 18 miliar dollar Amerika Serikat dalam impor dan 38 miliar dollar Amerika Serikat dalam ekspor pada 2020 (Amanta, 2023), oleh sebab itu dibutuhkan pemberdayaan pada sektor pertanian Indonesia agar produk pertanian yang dihasilkan dapat mengimbangi produk impor dan ekspor. Sebagai negara berkembang Indonesia menghadapi cukup banyak hambatan-hambatan dalam praktik

ekspor dan impor, diantaranya kebijakan tarif dan non-tarif. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak lahir dari satu negara saja, melainkan diwadahi oleh organisasi General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)/ World Trade Organization (WTO). Setelah banyaknya penyesuaian pengaturan tarif yang berlaku pada komoditas diseluruh dunia bagi negara maju dan berkembang diatur oleh WTO, berbagai macam bentuk tarif mulai berkurang. Adanya Batasan tarif mengakibatkan negara memberlakukan tindakan non-tarif (*Non-Tarif Measures/NTM*) sebagai bentuk perhatian pada produsen domestic dalam menghadapi persaingan impor dengan produk asing.

Kebijakan yang paling berpengaruh terhadap produk pertanian adalah hambatan non-tarif (*Non-Tariff Measures* atau NTM). Hambatan non-tarif terdiri dari tiga klasifikasi diantaranya; kebijakan teknis, kebijakan non-teknis, dan ekspor. Dapat disimpulkan hambatan non-tarif mengatur bagaimana standar kualitas produk yang ditawarkan pada pasar internasional. Penerapan kebijakan NTM terkhusus pada SPS (*Sanitary and Phytosanitary*) dan TBT (*Technical Barrier to Trade*) dalam klasifikasi teknis banyak diberlakukan di berbagai negara. Kebijakan SPS difokuskan pada sektor pertanian dan peternakan dalam perlindungan kesehatan dan kesejahteraan konsumen serta lingkungan. (UNCTAD, 2023) menyatakan akibat dari penetapan kebijakan tersebut sekitar 60% produk pangan akan terpengaruh dari indikator-indikator pada kebijakan SPS. TBT (*Technical Barrier to Trade*) ditetapkan lebih luas pada seluruh sektor ekonomi. Dampak positifnya saat ini adalah banyak negara-negara mengatur pengamanan perdagangan dengan menerapkan standarisasi sebagai wujud instrument menghadapi hambatan non tarif tersebut.

Negara berkembang dalam organisasi perdagangan dunia (WTO) mulai aktif berpartisipasi, terhadap masalah perdagangan dan pembangunan global dalam beberapa tahun terakhir. Masalah – masalah utama yang akan dibahas adalah perdagangan dan pembangunan yang terdapat dalam (Doha Development Agenda) diantaranya terkait isu utang dan keuangan, perdagangan dan transfer teknologi, kerjasama teknis dan pengembangan kapasitas, negara-negara terbelakang (LDC) serta perlakuan khusus dan perlakuan berbeda (Rafi & Rabbani, 2021). Kemudian timbulnya masalah akibat peningkatan

hambatan non-tarif pada aspek administratif dikarenakan pelaksanaan bea cukai yang tidak efektif dan efisien dan menimbulkan penurunan kapasitas perdagangan suatu negara. Hambatan non-tarif sering menjadi masalah bagi setiap negara untuk hubungan perdagangan dengan negara lain. Oleh karena itu negara – negara berkembang antusias untuk penyederhanaan ataupun penghapusan kebijakan non-tarif tersebut dan dapat menjaga kestabilan perekonomian dunia kembali melalui kegiatan perdagangan bilateral dan internasional (Apriyantono, 2021).

Kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan hambatan tarif dan non-tarif (NTMs) pada perdagangan internasional juga diupayakan di dalam negeri. Hal tersebut dapat menjadi peluang dan tantangan terhadap produk pertanian kedepannya. Pemerintah Indonesia melakukan tindakan untuk meningkatkan kinerja neraca internasional dengan mengutamakan sektor-sektor yang menguntungkan dan berpengaruh positif terhadap perdagangan internasional. Perlu adanya strategi pengembangan dalam setiap subsistem agribisnis untuk keberlanjutan perdagangan internasional produk pertanian.

## 2. LITERATURE REVIEW

### Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas atau transaksi yang dilakukan oleh satu negara dengan negara lain. Aktivitas tersebut dapat dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi atau lembaga pemerintahan. Menurut Apridar (2012) teori perdagangan internasional yang sampai saat ini masih berkembang secara umum dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu teori klasik, teori modern,

dan teori keunggulan kompetitif. Pelopor dari teori klasik salah satunya adalah Adam Smith yang mengemukakan teori absolute advantage (keunggulan mutlak), dimana negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negara memiliki keunggulan mutlak atas suatu barang dan mengimpor barang jika negara tidak memiliki keunggulan mutlak atas suatu barang. Selain itu David Ricardo juga memelopori teori klasik mengenai biaya relatif berdasarkan pada nilai tenaga kerja (*theory of labor value*) yang menyatakan bahwa nilai atau harga suatu *cost comparative* produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Menurut teori cost comparative advantage (*labor efficiency*), suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika memiliki produk berdaya saing dan potensial dalam hubungan beberapa negara dikarenakan dapat mempertahankan arus ekspor dan impor yang lebih stabil dan menguntungkan.

Selanjutnya adalah bagian teori modern yang dipelopori oleh Haberler dan Hecksher-Ohlin (H-O). Haberler menyatakan bahwa untuk melihat terjadinya perdagangan antar dua negara sekaligus melihat keuntungan dari perdagangan internasional dapat menggunakan konsep opportunity cost yang dapat dijelaskan dengan kurva possibility dan digabungkan dengan kurva indeferen. Opportunity cost adalah ongkos yang dikorbankan dari memproduksi satu barang untuk memproduksi barang lain yang dianggap mempunyai keuntungan komparatif. Sedangkan Hecksher-Ohlin menyatakan bahwa perbedaan opportunity cost suatu produk antara satu negara dengan negara lain

dapat terjadi karena adanya perbedaan jumlah faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Tan (1988) menyatakan bahwa dalam implementasinya, perdagangan antara dua negara sering merugikan negara yang lemah, karena negara maju mendominasi perdagangan internasional. Tingkat harga lebih banyak ditentukan oleh negara maju, hal ini disebabkan tingkat ketergantungan negara berkembang relatif lebih besar kepada negara maju daripada sebaliknya. Sehingga ada aturan yang berlaku dalam perdagangan internasional seperti adanya kebijakan ekspor di dalam dan di luar negeri dan kebijakan tarif guna melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh negatif kondisi perdagangan internasional yang tidak menguntungkan.

#### a. Pertumbuhan Ekonomi

Hossain dan Chowdhury (2001) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah indikator untuk menentukan kekayaan suatu bangsa. Sukirno (2010) mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi sendiri dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$\text{Pertumbuhan ekonomi} = \frac{\text{GDPriilt} - \text{GDPriilt-1}}{\text{GDPriilt-1}} \times 100\% \quad (1)$$

Berdasarkan rumus tersebut jika GDP riil sekarang lebih besar dibandingkan dengan GDP riil tahun sebelumnya hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat pertumbuhan ekonomi yang positif, dan hal ini juga berlaku sebaliknya. Selain itu Sukirno (2010) juga mengasumsikan bahwa tingkat

kemakmuran suatu negara direfleksikan oleh pendapatan suatu rata-rata yang diterima penduduknya. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin tinggi daya beli masyarakat dan peningkatan daya beli ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat pendapatan ini kemudian digunakan untuk membandingkan tingkat kesejahteraan berbagai negara.

Banyak teori-teori yang dikembangkan oleh ahli ekonomi terkait dengan pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah teori yang dikemukakan oleh Rostow mengenai teori tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Menurut (Sari, A et al. 2018) analisis yang dikemukakan oleh Rostow lebih difokuskan pada peran faktor-faktor utama yang mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ciri-ciri perubahan dalam setiap tahap pembangunan suatu masyarakat. Berdasarkan keyakinan yang dimiliki oleh Rostow bahwa pertumbuhan ekonomi tercipta sebagai akibat yang ditimbulkan dari perubahan yang fundamental baik dari sifat kegiatan ekonomi maupun dari kehidupan politik dan hubungan sosial dalam masyarakat. Menurut Rostow tahap-tahap pertumbuhan ekonomi di mulai dari masyarakat tradisional, prasyarat untuk lepas landas, lepas landas, gerakan kearah kedewasaan, dan masa konsumsi tinggi. Salah satu dari sekian banyak cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengerahkan atau mobilisasi dana tabungan guna menciptakan investasi dalam jumlah yang memadai untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Mekanisme perekonomian yang mengandalkan peningkatan investasi demi mempercepat pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui model pertumbuhan Harrod dan

Domar. Setiap perekonomian suatu negara seharusnya berusaha untuk menyisihkan sebagian pendapatan nasional guna untuk menggantikan barang-barang modal yang telah rusak. Pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kekuatan bagi suatu perekonomian untuk menghasilkan barang atau dapat mendorong memenuhi permintaan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pergerakan laju pertumbuhan dari gross domestic product (GDP) atau disebut juga dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang merupakan nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. GDP sering kali dijadikan sebagai indikator dalam mengukur kemajuan suatu negara. GDP terbagi menjadi dua jenis, yaitu GDP riil dan nominal. GDP riil mengukur perubahan output fisik dalam perekonomian antara periode yang berbeda dengan menilai semua barang yang diproduksi dalam dua periode tersebut pada harga yang sama atau dalam harga konstan. Sedangkan GDP nominal mengukur nilai output dalam suatu periode dengan menggunakan harga pada periode tersebut atau disebut juga dengan harga berlaku. Sukirno (1981) juga menyatakan bahwa PDB atau pendapatan nasional ini dapat dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan pendapatan, menghitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan (upah, sewa, bunga, dan laba) dari aktivitas konsumsi rumah tangga dalam suatu negara selama satu periode tertentu, hal tersebut sebagai output dan input dari

faktor-faktor produksi yang diberikan oleh perusahaan.

2. Pendekatan produksi, menghitung dengan menjumlahkan seluruh nilai produk yang dihasilkan oleh negara dari bidang agraris, jasa, industri, eksekutif, dan niaga selama satu periode tertentu.
  - a. Daya Saing

Dalam perdagangan internasional, daya saing komoditas atau kemampuan suatu negara sangatlah penting. Daya saing didefinisikan sebagai kemahiran dalam memproduksi produk yang lebih efisien dibandingkan produk yang diproduksi oleh negara lain, yang memungkinkan barang-barang ini masuk dan berkembang di pasar global. Daya saing suatu komoditas sering kali dinilai dengan menggunakan metode keunggulan absolut, keunggulan komparatif, dan keunggulan kompetitif. Keunggulan absolut menunjukkan bahwa suatu daerah berspesialisasi pada suatu produk tertentu jika produk tersebut menghasilkan keuntungan atau produktivitas absolut tertinggi. Adam Smith percaya bahwa perdagangan akan meningkatkan kemakmuran jika dilakukan melalui kerangka kerja perdagangan bebas. Perdagangan bebas mendorong para pelaku ekonomi untuk melakukan spesialisasi guna meningkatkan efisiensi. Manfaat perdagangan internasional akan terwujud jika sebuah negara berspesialisasi dalam manufaktur dan mengekspor barang-barang yang memiliki keunggulan absolut, serta membeli barang-barang yang tidak memiliki keunggulan absolut.

Menurut David Ricardo dalam Oktaviani dan Novianti (2009), perdagangan dapat dilakukan antar negara yang tidak memiliki keunggulan absolut pada komoditas yang diperdagangkan

dengan cara melakukan spesialisasi pada barang yang memiliki kerugian absolut yang lebih kecil atau keunggulan komparatif. Hal ini dikenal sebagai hukum keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif diklasifikasikan menjadi dua jenis: keunggulan komparatif biaya (efisiensi tenaga kerja) dan keunggulan komparatif produksi (produktivitas tenaga kerja). Komparatif Biaya menyoroiti bahwa suatu negara memiliki keunggulan komparatif jika negara tersebut menghasilkan produk yang membutuhkan lebih sedikit jam kerja dibandingkan negara lain, yang menghasilkan peningkatan efisiensi produksi. Sementara itu, *Production Comparative* menyoroiti bahwa suatu negara akan memperoleh keunggulan komparatif jika tenaga kerjanya dapat menciptakan lebih banyak barang/jasa dibandingkan negara lain dengan menggunakan lebih sedikit tenaga kerja. Keunggulan kompetitif adalah konsep yang lebih besar yang mencakup harga, kualitas, strategi, dan manfaat kebijakan. Keunggulan komparatif adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi manufaktur, pemasaran, dan memprediksi preferensi atau kepuasan konsumen. Menurut Porter, dalam persaingan global, suatu negara atau bangsa dikatakan memiliki keunggulan kompetitif jika memiliki empat faktor utama: kondisi faktor, kondisi permintaan, industri terkait dan pendukung, serta persaingan dan strategi industri. Selain keempat komponen inti tersebut, terdapat dua elemen pendukung yang mempengaruhi interaksinya, yaitu faktor peluang (kesempatan) dan pertimbangan pemerintah. Komponen-komponen ini digabungkan untuk menghasilkan Berlian Porter, sebuah sistem untuk mendapatkan keunggulan kompetitif.

b. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ekspor

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, faktor-faktor yang memengaruhi ekspor dalam penelitian ini yaitu: produk domestik bruto, jarak ekonomi, nilai tukar, dan populasi. Produk Domestik Bruto Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product/GDP) sebagai salah satu variabel utama dalam analisis aliran perdagangan gravity model menunjukkan besarnya kemampuan perekonomian suatu negara. Peningkatan GDP pada suatu negara maka akan meningkatkan volume ekspor negara tersebut.

- 1) Produk Domestik Bruto (PDB), juga dikenal sebagai Produk Domestik Bruto (PDB), adalah jumlah total pendapatan dan pengeluaran nasional relatif terhadap output barang dan jasa. PDB terdiri dari PDB nominal dan PDB riil. PDB digunakan untuk menyesuaikan output yang didasarkan pada harga konstan. PDB yang lebih besar yang dihasilkan di suatu negara juga berarti kapasitas yang lebih besar bagi negara tersebut untuk terlibat dalam perdagangan, dan diyakini bahwa PDB memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan PDB (Mankiw, 2006). PDB riil eksportir memiliki hubungan positif dengan volume ekspor karena pertumbuhan PDB riil eksportir menyebabkan PDB per kapita ekspor negara pengekspor meningkat, volume ekspor ke negara pengekspor meningkat. Selain itu, riil importir PDB memiliki korelasi positif dengan volume ekspor. Pada GDP riil importir juga memiliki hubungan positif terhadap volume ekspor. Peningkatan GDP riil importir menunjukkan pendapatan total

negara importir yang semakin besar sehingga meningkatkan kemampuan daya beli terhadap output negara pengekspor.

- 2) Jarak Ekonomi: Dalam model gravitasi, jarak ekonomi digunakan untuk analisis perdagangan bilateral. Ketika kecepatan transaksi meningkat, biaya transportasi akan meningkat dan volume energi yang dikeluarkan akan menurun. Jarak adalah indikator biaya transportasi yang dikeluarkan oleh suatu negara selama ekspedisi. Biaya transportasi meliputi ongkos pengapalan, biaya bongkar muat di pelabuhan, premi asuransi, dan berbagai pungutan selama komoditas tersebut diangkut dan disimpan di lokasi tertentu (Salvatore, 2007). Geografis suatu negara dapat berubah-ubah atau tetap, karena hal tersebut menggambarkan salah satu faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional, yaitu jarak ekonomi. Menurut Li, Song, dan Zhao (2008) untuk variabel jarak digantikan dengan menggunakan jarak ekonomi rata-rata yang telah dibobotkan untuk menunjukkan biaya perdagangan yang mana Disti merupakan jarak geografis antar negara
- 3) Nilai Tukar: Nilai tukar atau exchange rate atau kurs antara dua negara adalah tingkat harga yang disepakati penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan. Exchange rate dibagi menjadi dua yaitu nominal exchange rate dan riil exchange rate, nominal exchange rate adalah harga relatif dari mata uang dua negara sedangkan riil exchange rate adalah harga relatif dari barang-barang diantara dua negara (Mankiw,

2006). Kondisi nilai tukar seperti terapresiasinya mata uang domestik rupiah terhadap nilai tukar negara tujuan ekspor membuat harga domestik pada produk domestik relatif lebih mahal. Hal ini mendorong terjadinya peningkatan volume impor dari negara tujuan mitra dagang karena negara tujuan membutuhkan sedikit uang untuk membeli barang impor.

- 4) Populasi: Populasi digunakan untuk mengurangi ukuran suatu negara. Jumlah peserta adalah satu-satunya faktor yang penting dalam hal permintaan ekspor. Ketika jumlah penduduk suatu negara meningkat, begitu pula keinginan negara tersebut untuk membeli barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan warganya. Penawaran dan permintaan adalah dua sisi pertambahan populasi yang dapat mendorong ekspor. Pada fase pertumbuhan populasi, hal ini mengacu pada pertumbuhan angkatan kerja untuk memproduksi barang konsumsi. Antara kurva-kurva batas kemungkinan produksi negara yang bersangkutan akan ditambahkan dalam kepemilikan tenaga kerja di suatu negara secara keseluruhan. Pertumbuhan populasi dari sisi permintaan akan menyebabkan peningkatan permintaan domestik yang signifikan. Penurunan permintaan domestik di negara pengekspor akan menurunkan jumlah ekspor yang dilakukan oleh negara pengekspor (Salvatore, 2007). Kenaikan jumlah penduduk akan menggeser kurva permintaan ke kanan atas dan memperlihatkan bahwa dengan naiknya jumlah penduduk maka jumlah komoditi

yang diminta pada setiap tingkat harga akan lebih banyak (Lipsey *et al.*, 1995). Populasi yang semakin besar pada suatu negara akan meningkatkan volume ekspor negara pengekspor ke negara tujuan ekspor.

#### c. Non Tarif Measures (NTMs)

Meskipun semua NTM untuk pertanian, tekstil, dan pakaian telah dihapuskan sesuai dengan perjanjian WTO, penggunaan NTM dalam arti terbatas tidak memberikan ancaman bagi perekonomian terutama setelah tahun 2005. Namun, secara umum, NTM akan menjadi isu yang meningkat dalam perdagangan internasional, dan juga dalam forum-forum internasional lainnya. Robert Baldwin dalam PECC (2000), kebijakan yang mendistorsi perdagangan non-tarif adalah setiap tindakan (publik atau swasta) yang menyebabkan perdagangan internasional produk dan jasa, atau sumber daya lain, dialokasikan dengan cara mengurangi potensi pendapatan dunia yang sebenarnya. Cakupan NTM dapat terus meningkat karena pemerintah merancang strategi baru untuk melindungi produsen dalam negeri dari persaingan internasional. NTM mencakup semua tindakan selain tarif, mulai dari peraturan pelabelan hingga pengaruh makroekonomi terhadap kebijakan perdagangan. Langkah-langkah ini telah berkembang menjadi pengurangan tarif yang signifikan dan, dalam beberapa kasus, penghapusan sebagai hasil dari beberapa perjanjian perdagangan yang komprehensif dan istimewa, termasuk WTO dan perjanjian sebelumnya, serta perjanjian perdagangan regional (RTA). NTMs, terutama peraturan Sanitary and Phytosanitary (SPS) dan Technical Barriers to Trade (TBT), telah tersebar luas. Langkah-langkah ini memiliki banyak

kesamaan dengan langkah-langkah standar yang mengubah biaya dan permintaan potensial dengan menyelesaikan kelemahan pasar (informasi asimetris), pengaruh eksternal (Bacchetaryya dan Beverelli dalam Beghin, 2011).

Kata NTM merujuk pada berbagai tindakan non-tarif, dan definisi NTM cukup luas, dengan daftar yang panjang. Secara umum, Von Lampe, OECD, Nicita, UNCTAD, dan Rau, LEI, semuanya mendefinisikan NTM secara berbeda. Namun, hal ini menunjukkan bahwa istilah NTM lebih berkaitan dengan aktivitas daripada faktor-faktor yang berlaku di negara tersebut, seperti infrastruktur, kualifikasi, dan tata kelola. NTM biasanya didorong oleh kurangnya metode transportasi yang efisien, seperti jalan raya, yang mengarah pada kemungkinan NTM membatasi pengaruh perdagangan (Mellado et al. 2010). Sejak tahun 1994, UNCTAD telah mengumpulkan dan mengklasifikasikan hambatan non-tarif (NTB) dengan menggunakan Sistem Pengkodean Tindakan Pengendalian Perdagangan (TCMCS). Skema pengkodean ini kemudian membagi tarif, paratarif, dan tindakan non-tarif (NTMs) ke dalam 100 subkategori. Skema pengkodean ini kemudian digunakan untuk membuat database NTM yang dikenal sebagai database Skema Analisis dan Informasi Perdagangan (TRAINS). Kemudian, kerjasama antara UNCTAD dan Bank Dunia mengubah TRAINS menjadi sebuah sistem yang dapat diakses oleh para akademisi di seluruh dunia melalui program perangkat lunak yang dikenal sebagai World Integrated Trade Solution (WITS).

Kategorisasi United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) membedakan NTM dasar, seperti tingkat tarif,

kuota, dan pajak ekspor, dari tindakan-tindakan umum lainnya. Berdasarkan kelompok kategorisasi utama UNCTAD, fokus utama NTM adalah kebijakan perdagangan. UNCTAD telah membuat enam belas kelas. Terdapat enam kategori utama: tindakan pengendalian harga, tindakan pembiayaan, tindakan perizinan otomatis, tindakan pengendalian kuantitas, tindakan monopoli, dan tindakan teknologi. Kebijakan non-tarif dalam perdagangan internasional telah meningkat. Peningkatan ini telah berkembang sebagai tanggapan terhadap situasi beberapa tahun sebelumnya. Proses untuk mengklasifikasikan, menghitung, dan mengumpulkan data NTM telah berubah. Pada tahun 2006, Tim Pendukung Multi Agensi didirikan untuk mengembangkan dan meningkatkan kategorisasi, teknik penghitungan, dan pengumpulan data NTM. Non-tariff measures (NTM) adalah kebijakan selain tarif yang dapat memberikan dampak ekonomi terhadap perdagangan komoditas internasional dengan mengubah volume perdagangan, harga, atau keduanya (UNCTAD 2013). Klasifikasi NTM ini mencakup banyak cabang klasifikasi baru. Secara garis besar, klasifikasi ini dibagi menjadi dua bagian: tindakan impor dan tindakan ekspor. Tindakan impor diklasifikasikan ke dalam dua kategori: tindakan teknis dan tindakan non-teknis. Tindakan ekspor diklasifikasikan ke dalam satu jenis saja: tindakan yang berhubungan dengan ekspor.

#### d. SPS dan TBT

Hambatan teknis perdagangan (TBT) dan standar sanitasi dan fitosanitasi (SPS) ditantang oleh berbagai kemajuan teknologi. Kebijakan SPS terdiri dari undang-undang dan peraturan yang dirancang untuk melindungi hak asasi manusia, hak-hak

perempuan, dan hak-hak anak. Sebaliknya, TBT berlaku untuk standar, pedoman, dan prosedur untuk mengevaluasi teknologi lain yang digunakan untuk tujuan non-perdagangan. Misalnya, untuk memastikan keamanan, kualitas produk, perlindungan lingkungan, dan sebagainya. Beberapa

No	Data	Sumber Data
1	Ekspor Impor	UN Comtrade
2	GDP	Worldbank
3	Populasi	Worldbank
4	Nilai Tukar	Worldbank
5	Jarak	CEPII
6	SPS TBT	Wits. worldbank

cabang SPS mencakup hukum, keadilan, peraturan, standar, persyaratan administrasi, dan prosedur

yang melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Hambatan teknis perdagangan (atau TBT) adalah hukum atau peraturan yang berkaitan dengan spesifikasi teknis suatu produk tertentu dan adanya sistem untuk memastikan kepatuhan standarisasi. Menurut UNCTAD (2013), prosedur sanitasi dan fitosanitasi adalah prosedur yang digunakan untuk melindungi kehidupan manusia atau hewan dari bahaya yang ditimbulkan oleh keberadaan obat-obatan adiktif, polutan, racun, atau organisme penyebab penyakit dalam makanan mereka. Mereka berusaha melindungi manusia, tanaman, atau hewan dari hewan pembawa penyakit, serta melindungi hewan atau tanaman dari hama, penyakit, atau organisme penyebab penyakit. Selain itu, mencegah atau membatasi kerusakan tambahan pada suatu negara yang disebabkan oleh masuknya hama, pembentukan, atau penyebaran, serta melindungi keanekaragaman hayati. Selain menjaga kelangsungan kehidupan manusia, hal ini termasuk

tindakan yang dilakukan untuk menjaga kesehatan ikan dan satwa liar, serta hutan dan flora alami.

### 3. METHOD, DATA, AND ANALYSIS

#### 3.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ekspor Indonesia dengan negara G-20 menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti data instansi, penelitian terdahulu, internet serta studi pustaka. Data yang digunakan merupakan data panel, yaitu gabungan data (*cross section*) dan (*time series*) (Bambang, 2012).

Tabel 1. Jenis dan Sumber Data

Sumber: Data Primer (diolah)

Data deret waktu berupa data pada periode 2012 sampai 2022 selama sebelas tahun, sedangkan data cross section berupa data perdagangan ekspor impor Indonesia dengan negara G-20, nilai GDP, populasi, nilai tukar, jarak ekonomi, SPS dan TBT. Data sekunder perdagangan ekspor dan impor Indonesia dengan negara G-20, yaitu United Kingdom, USA, Argentina, Australia, Brazil, Kanada, China, Uni Eropa, Korea Selatan, Perancis, Germany, India, Italia, Jepang, Meksiko, Russia, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Turki.

#### 3.2 Model Gravity

Model gravitasi merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui volume dari aktivitas impor dan ekspor barang di suatu wilayah dan digunakan untuk menganalisis peredaman ekonomi perdagangan. Menurut (Sari, A. et al. 2018), model gravitasi membatasi perdagangan dan potensi seperti biaya transportasi, perbatasan nasional dan internasional, karakteristik geografis

dan masyarakat, dan peraturan lain yang mempengaruhi perdagangan antar negara. Oleh karena itu, teori gravitasi diterapkan untuk mendapatkan hasil yang paling akurat. Menurut model gravitasi, PDB, PDB per kapita, jumlah penduduk, nilai tukar, dan jarak memiliki dampak pada variabel nilai perdagangan. Variabel lain yang

dimanipulasi adalah SPS dan TBT. Hal ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi ekspor impor Indonesia dengan negara G-20 yang juga sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Karosekali, 2021) dan (Astuti *et al.*, 2023).

$$\text{Ln TRADE} = \alpha + \beta_1 \text{Ln\_GDPit} + \beta_2 \text{Ln\_GDPjt} + \beta_3 \text{Ln\_POPit} + \beta_4 \text{Ln\_POPjt} + \beta_5 \text{Ln\_GDPPCit} + \beta_6 \text{Ln\_GDPPCjt} + \beta_7 \text{Ln\_EXC} + \beta_8 \text{Ln\_JEijt} + \beta_9 \text{Ln\_CRSPSt} + \beta_{10} \text{Ln\_CRTBTjt} + \mu_{ijt}$$

(2)

dimana:

Ln TRADE : Logaritma natural nilai perdagangan terhadap 18 negara mitra dagang pada tahun t (USD)

Ln GDPit : Logaritma natural GDP negara asal pada tahun t (USD)

Ln GDPjt : Logaritma natural GDP negara mitra pada tahun t (USD)

Ln POPit : Logaritma natural populasi negara asal pada tahun t (USD)

Ln POPjt : Logaritma natural populasi negara mitra pada tahun t (USD)

Ln GDPPCit : Logaritma natural GDP per Capita negara asal pada tahun t (USD)

Ln GDPPCjt : Logaritma natural GDP per Capita negara mitra pada tahun t (USD)

Ln EXC : Logaritma natural Nilai tukar (USD)

Ln JEit : Logaritma natural jarak ekonomi negara asal dengan mitra (Km/USD)

Ln CRSPSt : coverage ratio SPS negara pengimpor j terhadap Indonesia pada tahun t (%)

Ln CRTBTjt : coverage ratio TBT negara pengimpor j terhadap Indonesia pada tahun t (%)

$\mu_{ijt}$  : galat (error term)

$\alpha$  : Intercept

$\beta$  : Slope

#### 4. RESULT AND DISCUSSION

- a. Faktor yang mempengaruhi perdagangan Internasional Indonesia

Gravity model merupakan adaptasi model gravitasi fisika dalam memprediksi aliran perdagangan antar dua negara berdasarkan ukuran ekonomi. Gravity model berbanding lurus dengan

massa dan berbanding terbalik dengan jarak antar negara. Dengan gravity model dapat melihat faktor-faktor yang memengaruhi perdagangan antar negara seperti GDP antar negara, populasi, jarak, dan hambatan non-tarif. Berikut hasil estimasi gravity model Indonesia terhadap negara-negara G-20:

Tabel 2. Hasil Estimasi Gravity Model dengan Pendekatan Common Effect Model

Tabel 2. Hasil Estimasi Gravity Model dengan Pendekatan Common Effect Model

Variabel	Coef.	Std. Error	Prob.
C	93739	7.04	0.000

gdpi	0.235	0.62	0.538
gdpij	0.505	4.02	0.000*
popi	-11.007	-8.40	0.000*
popj	0.278	1.30	0.195
gdppi	2.445	4.32	0.000*
gdppj	0.256	1.16	0.246
dist	-0.907	-1.83	0.067
Exc	-0.067	-1.90	0.057
sps	-5.371	-1.32	0.188
tbt	0.442	1.43	0.153

Keterangan: (\*) signifikan pada taraf 1%

Sumber: Data Primer (diolah)

GDP negara tujuan memiliki koefisien bertanda positif dan signifikan terhadap ekspor Indonesia dengan negara G-20, dilihat dari hipotesis awal, hasil uji menunjukkan nilai probabilitas variabel GDP negara partner lebih kecil dari taraf nyata 1% ( $0,00 < 1\%$ ). Koefisien variabel GDP negara partner sebesar 0,505 memiliki arti bahwa setiap peningkatan GDP negara partner sebesar 1% maka ekspor Indonesia dengan negara G-20 akan meningkat sebesar 0,51%, begitu juga sebaliknya, *ceteris paribus*. Peningkatan GDP negara partner akan mendorong peningkatan ekspor Indonesia terhadap negara G-20. Impor akan meningkat sejalan dengan peningkatan produksi di negara partner. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Irshad dan Anwar 2019; Astuti et al. 2023) yang juga menyatakan bahwa GDP akan berpengaruh positif terhadap ekspor maupun impor pada suatu negara dan meningkatkan perdagangan dari negara lain.

Populasi negara mengindikasikan pengaruh terhadap perkembangan perdagangan antar negara. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan koefisien variabel

populasi negara asal sebesar -11.007 dengan nilai probabilitas sebesar 0.000. Hubungan ini menunjukkan bahwa variabel populasi negara asal memberikan pengaruh negative signifikan terhadap ekspor, dimana setiap penurunan populasi negara asal sebesar 1% akan meningkatkan ekspor sebesar 11% *ceteris paribus* yang didukung dalam (Saravistha, 2023).

PDB per kapita negara asal (GDPPi) memberikan pengaruh positif signifikan terhadap ekspor Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan koefisien PDB perkapita negara asal sebesar 2,445 dengan nilai probabilitasnya 0.000. Hubungan ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan PDB perkapita negara asal sebesar 1% akan meningkatkan ekspor sebesar 2,45%, *ceteris paribus*. Pengaruh tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan daya beli. Peningkatan daya beli akan meningkatkan nilai perdagangan ekspor yang ikut naik. Apabila PDB perkapita suatu negara tinggi akan memberikan gambaran ekonomi yang tinggi, sehingga pasar yang tersedia untuk melakukan perdagangan pun semakin besar.

Pemberlakuan hambatan Non-Tariff Measures (NTMs) SPS dan TBT sama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap total ekspor Indonesia dengan Negara G-20. SPS secara statistik memiliki pengaruh negative dan TBT berpengaruh positif terhadap ekspor Indonesia. Dalam (Karoekali 2021) menyatakan bahwa SPS dan TBT berpengaruh negative dan signifikan pada ekspor perkebunan Indonesia, dikarenakan hambatan Non-tarif SPS dan TBT hampir mengatur seluruh standar keamanan pangan, Kesehatan manusia, dan maksimum residue limits (MRLs). MRLs adalah Batasan residu pestisida yang ditoleransi pada makanan atau pakan ternak Ketika pestisida digunakan. Sehingga dari penelitian ini jika dilihat lebih luas dari total ekspor Indonesia selain dari komoditas pertanian SPS masih berpengaruh negative namun tidak signifikan dan TBT berpengaruh positif tidak signifikan.

Secara keseluruhan hambatan non-tarif berpengaruh 13% terhadap total ekspor. Namun dari persentase tersebut berdampak 4 kali lipat pada ekspor pertanian secara teknis antar negara G-20. Oleh karena itu kemampuan Indonesia untuk bersaing di pasar internasional sangat bergantung pada kemampuan Indonesia memenuhi persyaratan *sanitasi and phytosanitary* (SPS) dan *barrier to trade* (TBT)

b. Strategi Pengembangan Produk Pertanian di Indonesia

Untuk memutuskan strategi dalam pengembangan produk pertanian, pemangku kebijakan harus mengetahui peluang apa yang akan kita manfaatkan dan hambatan apa yang harus diatasi. Indonesia harus bisa mengontrol kebijakan apa yang bisa diatasi di dalam negeri sendiri tanpa harus bergantung kepada negara lain. Jika antara negara-negara berkembang menginginkan penghapusan hambatan non-tarif maupun penyerdehanaannya. Hal tersebut tidak bisa diputuskan oleh satu negara saja, melainkan membutuhkan persetujuan berbagai negara dan diskusi yang alot dikarenakan dalam beberapa tahun hal tersebut belum dapat diwujudkan. Oleh karena itu, sebaiknya Indonesia fokus pada prioritas yang bisa diatasi oleh kewenangan sendiri. Strategi pengembangan produk pertanian menghadapi hambatan non-tarif sangat penting dilakukan, karena hambatan non-tarif lebih berdampak pada ekspor pertanian dibandingkan total ekspor secara keseluruhan. Walaupun hambatan non-tarif dirasakan oleh semua negara eksportir, namun lebih sulit dirasakan oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Sampai saat ini dalam Munadi (2019) dampak hambatan non-tarif empat kali lebih tinggi di bandingkan dampak kebijakan tarif, yaitu non-tarif 22% dan tarif 5% memberikan berdampak pada sektor pertanian.

Strategi yang bisa Indonesia lakukan adalah dengan mematuhi peraturan SPS dan TBT yang cukup ketat untuk mempertahankan dan meningkatkan kerjasama dengan negara mitra dagang di pasar internasional. Selain dapat meningkatkan kualitas produk dan sumberdaya manusianya, strategi tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia

dan negara-negara inportir yang bergantung pada sektor pertanian Indonesia. Jika dilihat dengan biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi standar pada peraturan non-tarif dalam pasar internasional, hal tersebut berbanding lurus dan positif pada output yang didapatkan, diantaranya pelaku eksportir dari Indonesia menerapkan standarisasi internasional pada produknya untuk dapat bersaing dan berkelanjutan di pasar internasional, dampaknya nilai produk dapat ditingkatkan dan penolakan dapat dihindari. Sehingga dalam jangka panjang Indonesia dapat memperkuat posisi perdagangan di pasar Internasional.

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki produk-produk pertanian yang berdaya saing diantaranya subsektor perkebunan, hortikultura, pangan dan lain sebagainya. Bahkan produk yang dihasilkan memiliki peranan yang cukup potensial di beberapa negara. Dalam beberapa tahun terakhir produk sayuran dan buah-buahan Indonesia mengalami peningkatan. Banyak negara maju yang sangat bergantung pada sektor pertanian Indonesia. Hal yang tidak mudah untuk dapat melewati standar produk terhadap penetapan kebijakan teknis SPS dan TBT, namun bukan berarti Indonesia tidak bisa. Indonesia perlu melakukan pemberdayaan petani naik pada level eksportir yang mampu memenuhi standar dalam perdagangan internasional. Mengenalkan prinsip ilmiah, penilaian resiko dari tradisi petani yang belum memenuhi standar kesehatan dalam jangka panjang, batas toleransi residu dari pemakaian pestisida kimia, mendorong sertifikasi (ISPO, Halal dan pelabelan internasional berkelanjutan) serta regulasi dalam mendukung administrasi produk ekspor serta akses informasi peluang produk

ekspor. Kurangnya kesadaran petani maupun pelaku usaha terhadap pentingnya meningkatkan daya saing dengan memenuhi standarisasi internasional, dapat disebabkan karena kurang terbukanya informasi mengenai peluang-peluang kebutuhan luar negeri yang dapat di suplai dari produk lokal. Sehingga kepentingan untuk memenuhi sertifikasi internasional yang berkelanjutan tidak dapat berjalan dengan cepat, seperti sertifikasi halal sebagai negara mayoritas muslim, Indonesia masih belum menjadi negara produsen terbesar untuk produk halal (Istiqlal, 2023). Sehingga perlu mengoptimalkan peran pemerintah, pelaku usaha dan petani untuk mendukung eksportir-eksportir dalam rantai pasok pasar internasional.

Strategi selanjutnya adalah dengan mengembangkan sumberdaya manusia untuk mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah potensi ekspor. Industri hasil pertanian atau disebut sebagai agroindustri dapat menjadi “*double solution*” terhadap daya saing ekspor Indonesia dan pertumbuhan ekonomi. Selain membutuhkan sumberdaya yang memiliki keahlian lebih, juga menyerap tenaga kerja untuk mencapai tujuan usaha. Hal tersebut dapat menjadi solusi menghadapi kebijakan SPS berdampak negatif pada hasil pertanian primer. Sektor pertanian yang diekspor sampai saat ini masih didominasi oleh produk primer tanpa pengolahan, sehingga dampak SPS akan jauh berdampak pada sektor pertanian hingga mencapai 4x lipat dari sektor lainnya. Biji kopi yang di ekspor seharusnya dapat dilakukan proses pengolahan terlebih dahulu dengan kualitas yang memenuhi standar ekspor menjadi kopi bubuk ataupun produk olahan kopi lainnya. Sosialisasi

kepada petani untuk lebih mengenal sumber-sumber informasi terkait ekspor-impor juga perlu ditingkatkan untuk memperoleh akses informasi perdagangan dan tarif dalam organisasi ekonomi dunia, regulasi teknis dan persyaratan negara tujuan, laju ekspor produk-produk hasil pertanian Indonesia, dan lainnya. Seperti hasil perikanan yang mampu menyesuaikan diri dengan kebijakan SPS dan TBT untuk menembus pasar internasional dan memenuhi standar negara importir. Bahkan di beberapa olahan perikanan Indonesia SPS dan TBT tidak berpengaruh negatif, seperti olahan tuna. Namun, disamping itu yang menjadi hambatan adalah jarak ekonomi dan hambatan teknis lainnya. Sehingga dari beberapa faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional Indonesia, strategi yang dibuat juga bisa memperhatikan manajemen rantai pasok untuk dapat menjaga kualitas produk selama perdistribusian menuju negara tujuan ekspor (Tristi, M et al. 2021)

Dalam strategi peningkatan kualitas dan kuantitas ekspor Indonesia, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan standarisasi negara tujuan, Indonesia juga sangat membutuhkan “*branding*” produk ekspor yang didukung oleh pemerintah. Branding produk tersebut dapat membantu memberikan “*trust*” atau kepercayaan negara tujuan melakukan transaksi internasional dengan Indonesia. Hasil ini sependapat dengan Korschun (2017) bahwa branding atau meningkatkan reputasi negara terhadap produk ekspor dapat meningkatkan ekspor sebesar 2%. Jika Indonesia secara konsisten mampu mempertahankan kualitas dan pelayanan terhadap negara tujuan, branding dapat memperluas kerjasama antar negara dalam perdagangan Internasional. Strategi untuk

Indonesia harus mampu menyesuaikan dengan standarisasi non tarif, karena sebagian masyarakat sudah semakin peduli dengan kesehatan dan kualitas produk dan akan terus berkembang. Indonesia harus mampu mengikuti perubahan pola konsumsi masyarakat domestik maupun internasional. Semakin ketat standarisasi pada produk pertanian menjadi tantangan awal dan akan menjadi peluang jika Indonesia mampu dengan cepat menyesuaikannya. Dampak yang ditimbulkan berupa pertumbuhan pendapatan pada aspek ekonomi, mampu menghasilkan produk-produk berkualitas dan memenuhi standar kesehatan pada aspek sosial, dan dapat mengurangi kerusakan lingkungan dengan mengurangi penggunaan bahan kimia, perbaikan mutu dan pengurangan emisi gas kaca. Jadi, dalam jangka panjang strategi sektor pertanian dalam menghadapi hambatan non-tarif dapat meningkatkan daya saing hingga pertumbuhan ekonomi yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan.

## CONCLUSION AND SUGGESTION

Indonesia memiliki banyak peluang dalam perdagangan internasional. Beberapa faktor yang berpengaruh signifikan terhadap ekspor Indonesia adalah GDP dan GDPPC negara mitra. Indonesia cukup memiliki banyak negara mitra dengan nilai GDP yang tinggi, sehingga tingginya nilai GDP negara mitra dan apabila mengalami peningkatan akan meningkatkan ekspor Indonesia. Faktor populasi Indonesia sebagai negara asal walaupun memiliki hubungan yang negatif namun, jika sumberdaya manusia diberdayakan akan dapat memanfaatkan ketersediaan sumberdaya alam sebagai produk yang bisa dikomersilkan di pasar

internasional. Namun peluang tersebut sering terhambat secara teknis oleh hambatan non-tarif SPS dan TBT. Hal tersebut berdampak empat kali lipat terhadap sektor pertanian di Indonesia sebagai negara berkembang. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan pemberdayaan petani dan pelaku usaha menjadi level eksportir. Dengan melihat kendala yang selama ini di hadapi strategi yang tepat adalah dengan mengenalkan prinsip ilmiah, penilaian resiko dari tradisi petani yang belum memenuhi standar kesehatan dalam jangka panjang, batas toleransi residu dari pemakaian pestisida kimia, mendorong sertifikasi (ISPO, Halal. dan pelabelan internasional berkelanjutan) serta regulasi

dalam mendukung administrasi produk ekspor serta akses informasi peluang produk ekspor. Sehingga dengan pengembangan sektor pertanian pada perdagangan internasional dapat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia yang sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045, yaitu Indonesia dapat mengejar pendapatan perkapita setara negara maju dengan target pada level *middle income trap*.

## REFERENCE

- Amam & Rudiana, S. (2021). Pertanian Indonesia dalam Menghadapi Persaingan Pasar Bebas. *Jurnal AGRIOVET*. 4(1)
- Amanta, F. (2023). *Memodernisasi Pertanian Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, Indonesia
- Apridar. (2012). *Ekonomi Internasional Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya*. Yogyakarta (ID): Graha Ilmu
- Apriyantono, A. (2021). Kepentingan Pertanian Indonesia dalam Perdagangan Internasional. *Indones J Int Law*. 4(3). doi:10.17304/ijil.vol4.3.149
- Astuti, E. P., Nurmalina, R., & Rifin, A. (2023). Pengaruh Hambatan Tarif Dan Sps Pada Perdagangan Pertanian Indonesia Dengan Negara G-20. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 17(1).
- Bambang, J. (2012). *Ekonometrika deret waktu : teori dan aplikasi*. Bambang Juanda.
- Bhattacharyya, R. (2011). *Revealed Comparative Advantage And Competitiveness: A Case Study For India In Horticultural Products*. International Conference On Applied Economics. Department Of Economics. Calcutta Girls' College. Kolkata. India.
- Disdier, A.C., Lionel, F., & Mondher, M. (2007). The Impact of Regulations on Agricultural Trade: Evidence from SPS and TBT Agreements. Working Paper 06/22. Agricultural Trade Agreements. <http://tradeag.vtamib.com>.
- Hossain, A dan Chowdhury, A. 2001. Open-Economy Macroeconomics for Developing Countries. Edward Elgar Publishing : United Kingdom.
- Istiqlal, F. (2023). Membangun Global Halal Hub Indonesia: Strategi dan Peluang untuk Mencapai Kompetitif di Pasar Global. *Halal Research*, 3(3) (2023) 72-85.
- Karosekali, A. (2021). Dampak Sanitary and Phytosanitary (Sps) Dan Technical Barrier To Trade (Tbt) Terhadap Ekspor Komoditas Teh Di Indonesia. *Agriprimattech*. 5(1):45–56. doi:10.34012/agriprimattech.v5i1.2077.
- Li, K., Song, L., & Zhao, X. (2008). Component Trade and China's Global Economic Integration. *World Institute for Development Economics Research*. 101(2): 1-25. doi : 978-92-9230-157-6.
- Lipsey, R.G. et al. 1995. Pengantar Mikroekonomi. Jilid kesatu. Edisi Kesepuluh. Binarupa Aksara. Jakarta

- Mankiw, Gregory N. 2006. Principles of Economics, Pengantar Ekonomi Makro. Edisi Ketiga. Alih Bahasa Chriswan Sungkono. Salemba Empat: Jakarta.
- Mellado, A.G., Sophie, H. Rau, M.L., & Monika, T (2010). *Non-tariff measures affecting agrofood trade between the EU and Africa*. Summary of Workshop. European Commission. Joint Research Centre. Institute for Prospective Technological Studies. European Union
- Munadi & Saputri. (2019). *Exploring Non-Tariff Measures Facing the Indonesian Agricultural Products in FTA/CEPA Trading Partners*. Proceeding of the 3rd International Conference on Trade (ICOT 2019)
- Oktaviani, R., & Novianti, T. (2009). *Teori Perdagangan Internasional dan Aplikasinya di Indonesia*. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor
- Rafi, D., & Rabbani, S. (2021). Telaah Kritis Tfa Wto (World Trade Organization): Analisis Terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional di Indonesia (a Critical Study of Tfa Wto (World Trade Organization): Analysis of the Implementation of International Trade Policies in Indonesia). *J Huk Lex Gen*. 2(1):14–39.
- Salvatore, D. (1996). *Ekonomi Internasional*. Jakarta (ID)
- Saravistha, Wibawa, Suandika, Suryana. (2023). Kebijakan G20 Sebagai Nafas Baru Bagi Lalu Lintas Devisa di Era Crossborderless Dalam Hukum Perdagangan Internasional. *Jurnal Kertha Wicaksana*.
- Sari, A., Hakim, D., & Anggraeni, L. (2018). ANALISIS PENGARUH NON-TARIFF MEASURES EKSPOR KOMODITI CRUDE PALM OIL (CPO) INDONESIA KE NEGARA TUJUAN EKSPOR UTAMA. , 3, 111-135. <https://doi.org/10.29244/JEKP.3.2.111-135>.
- Sukirno, S. (1981). *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta (ID): Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Sukirno, S. (2010). *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar kebijakan*. Jakarta (ID): Kencana
- Tan, S. (1988). *Esensi Ekonomi nternasional*. Jakarta (ID): Ghalia Indonesia
- Tristi, M., Harianto, H., & Rifin, A. (2021). Dampak Kebijakan Tarif dan Non-tarif Negara-Negara Importir atas Ekspor Tuna Olahan Indonesia. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*. <https://doi.org/10.18343/jipi.26.3.468>.
- UNCTAD. (2013). *Non Tariff Measures to Trade: Economic and Policy Issues for Developing Countries*. (UNCTAD/DITC/TAB/2013/1). Switzerland. Geneva
- UNCTAD. (2023). *Guidelines for the Collection of Data on Official Non-tariff Measures* (UNCTAD/DITC/TAB/2023/4). New York and Geneva.